



INDEKS EFEKTIVITAS TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan

Jakarta, 2023

DASAR HUKUM

1. UU Uap Tahun 1930
2. UU No 3 Tahun 1951 ttg Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Th 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
3. UU No 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
4. UU No 7 Tahun 1981 ttg WLKP
5. UU No 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
6. UU No. 2 Tahun 2004 ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
8. UU No 18 Tahun 2017 ttg Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9. Permenaker no 33 Tahun 2016 ttg Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yg diubah dengan Permenaker No 1 Tahun 2020
10. Permenaker no 8 Tahun 2022 ttg Perubahan atas Permenaker No 10 Tahun 2021 ttg Renstra Kemnaker Tahun 2020-2024
11. Permenaker no 11 Tahun 2021 ttg Indikator Kinerja Utama Kemnaker
12. KEP. Dirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/189/AS.02.06/VIII/2022 ttg Pedoman Penilaian Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan :

Suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan tatakelola pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang sangat mendasar meliputi komitmen, sarana dan prasarana, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Sasaran Program : Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Tujuan : Mengetahui tingkat efektivitas tata cara pengawasan ketenagakerjaan dalam mewujudkan perlindungan tenaga kerja

Indikator Kinerja : Nilai Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan

Satuan : Nilai

Definisi Operasional : Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan Digunakan Untuk Mengevaluasi Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan



Permenaker No. 10 Tahun 2021

Ttg Renstra Kemnaker Tahun 2020-2024

Pembinaan Ketenagakerjaan 2/4						
SP : Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja		2020	2021	2022	2023	2024
-	IKP : Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	101.160 Perusahaan	121.400 Perusahaan	182.100 Perusahaan	282.240 Perusahaan	451.580 Perusahaan
-	IKP : Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	2.529.000 Orang	3.035.000 Orang	4.552.500 Orang	7.056.010 Orang	11.289.510 Orang
Kegiatan 1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
1. SK : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
-	IKK : Nilai rata-rata indeks kinerja lembaga pengawasan ketenagakerjaan	n/a	50	55	60	65
-	IKK : Nilai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan	n/a	60	65	70	75
-	IKK : Jumlah perusahaan besar yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	4.625 Perusahaan	4.625 Perusahaan	4.625 Perusahaan	4.625 Perusahaan
	IKK : Jumlah perusahaan menengah yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	62.612 Perusahaan	62.612 Perusahaan	62.612 Perusahaan	62.612 Perusahaan
	IKK : Jumlah perusahaan kecil yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	139.301 Perusahaan	139.301 Perusahaan	139.301 Perusahaan	139.301 Perusahaan
	IKK : Jumlah perusahaan mikro yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	241.552 Perusahaan	241.552 Perusahaan	241.552 Perusahaan	241.552 Perusahaan
Kegiatan 2 : Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja						
SK : Meningkatnya kualitas kelembagaan K3						
-	IKK : Nilai rata-rata indeks kinerja kelembagaan K3	n/a	50	55	60	65
	IKK : Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	1.100 Perusahaan	1.200 Perusahaan	1.300 Perusahaan	1.400 Perusahaan	1.500 Perusahaan
	IKK : Persentase Kader Norma Ketenagakerjaan dan K3 yang ditugaskan ke perusahaan	n/a	20%	30%	40%	50%

Permenaker No 8 Tahun 2022 ttg Perubahan atas Permenaker No. 10 Th 2021

ttg Renstra Kemnaker Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pembinaan Ketenagakerjaan 2/5						
	SP : Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja					
	- IKP : Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	101.160 Perusahaan	121.400 Perusahaan	182.100 Perusahaan	282.240 Perusahaan	451.580 Perusahaan
	- IKP : Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	2.529.000 Orang	3.035.000 Orang	4.552.500 Orang	7.056.010 Orang	11.289.510 Orang
Kegiatan 1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
1. SK : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
	- IKK : Nilai rata-rata indeks kinerja lembaga pengawasan ketenagakerjaan	n/a	50	55	60	65
	- IKK : Nilai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan	n/a	60	65	70	75
	- IKK : Jumlah perusahaan besar yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	8.962 Perusahaan	8.962 Perusahaan	8.962 Perusahaan	8.962 Perusahaan
	- IKK : Jumlah perusahaan menengah yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	58.252 Perusahaan	58.252 Perusahaan	58.252 Perusahaan	58.252 Perusahaan
	- IKK : Jumlah perusahaan kecil yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	67.213 Perusahaan	67.213 Perusahaan	67.213 Perusahaan	67.213 Perusahaan
	- IKK : Jumlah perusahaan mikro yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	313.663 Perusahaan	313.663 Perusahaan	313.663 Perusahaan	313.663 Perusahaan
	- IKK : Persentase kader norma ketenagakerjaan yang ditingkatkan kompetensinya	n/a	20%	30%	40%	50%
	- IKK : Persentase kader norma ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi	n/a	60%	65%	70%	75%

Permenaker No. 11 Tahun 2021

Ttg Indikator Kinerja Utama Kemnaker

- 62 -

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				kinerjanya adalah Lembaga Pengawasan yang ada di Pusat (Direktorat Teknis) dan Daerah (Korwil, Satwasker, UPTD).		
		Nilai Indeks efektivitas tata cara pengawasan ketenagakerjaan	Nilai	Indeks Efektivitas tata cara pengawasan ketenagakerjaan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tata cara pengawasan ketenagakerjaan.	Indeks Efektivitas diperoleh dari hasil survei oleh lembaga survei yang kompeten pada tahun n.	
		Jumlah perusahaan besar yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	Perusahaan	Penambahan Perusahaan besar yang melaporkan kondisi ketenagakerjaan melalui WLKP Online.	Jumlah perusahaan besar yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online: $\sum \text{Penambahan perusahaan besar melapor dalam WLKP}$ Pada tahun n.	

Sumber Data Pengukuran Indeks-Wasnaker

Data **riil** dan **sekunder** yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

Objek Pengukuran →

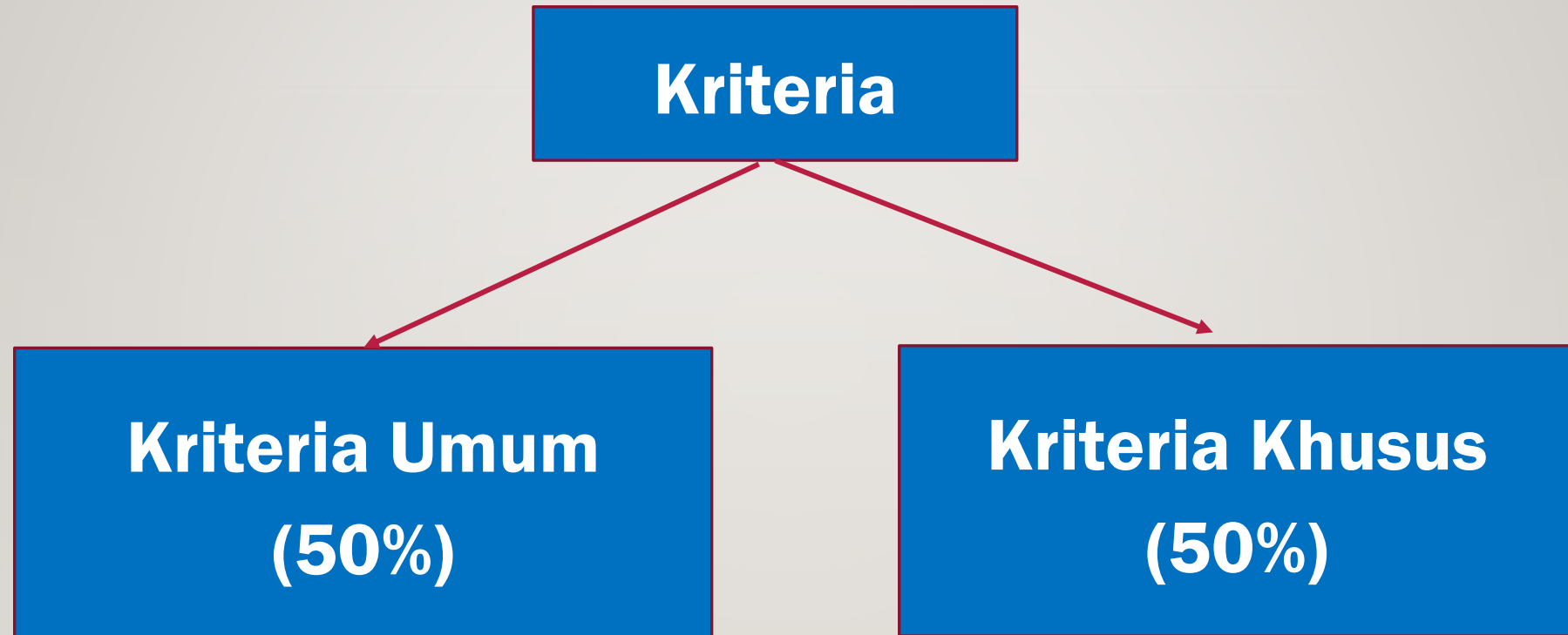
- Pejabat Struktural pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan provinsi, UPTD Pengawasan, Balai K3 pusat/daerah
- Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
- Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Penyelenggara Administrasi Teknis Pengawasan.

Unit Kerja →

- Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi,
- UPTD Pengawasan, Koordinator Wilayah, Satuan Tugas Wasnaker
- Balai K3 pusat/daerah.



INDEKS EFEKTIVITAS TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



A. Kriteria Umum (50%)

VARIABEL, SUBVARIABEL		Bobot	INDIKATOR
Variabel I	KOMITMEN	45,00	
Sub Variabel 1	Rencana Program dan Kegiatan	11,00	1 Indikator
Sub Variabel 2	Ketersediaan Anggaran	15,00	1 Indikator
Sub Variabel 3	Organisasi	9,00	3 Indikator
Sub Variabel 4	Sumber Daya Manusia	10,00	4 Indikator
Variabel II	SARANA dan PRASARANA	35,00	34 Indikator
Variabel III	KOORDINASI	20,00	5 Indikator
Jumlah		100,00	

Butir Indeks Wasnaker

B. Kriteria Khusus (50%)

VARIABEL, SUB VARIABEL		Bobot	INDIKATOR			
			Target	Waktu	Biaya	Metode
Variabel I	PERENCANAAN	30,00	V	V	V	V
Variabel II	PELAKSANAAN	50,00				
Sub Variabel 1	Pembinaan	20,00	V	V	V	V
Sub Variabel 2	Pemeriksaan	15,00	V	V	V	V
Sub Variabel 3	Pengujian	10,00	V	V	V	V
Sub Variabel 4	Penyidikan	5,00	V	V	V	V
Variabel III	PELAPORAN	20,00	V	V	V	V
Jumlah		100,00				

Cara Perhitungan Indeks Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

A. Kriteria Umum (50%)

VARIABEL, SUBVARIABEL		Bobot	Hasil	Nilai	Prosentase nilai
Variabel I	KOMITMEN	45,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 1	Rencana Program dan Kegiatan	11,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 2	Ketersediaan Anggaran	15,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 3	Organisasi	9,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 4	Sumber Daya Manusia	10,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Variabel II	SARANA dan PRASARANA	35,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Variabel III	KOORDINASI	20,00	a	a x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Jumlah		100,00		ΣNilai	Σ%Nilai

B. Kriteria Khusus (50%)

VARIABEL, SUB VARIABEL		Bobot	INDIKATOR				Hasil	Nilai	Prosentase nilai
			Target	Waktu	Biaya	Metode			
Variabel I	PERENCANAAN	30,00	V	V	V	V	b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Variabel II	PELAKSANAAN	50,00					b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 1	Pembinaan	20,00	V	V	V	V	b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 2	Pemeriksaan	15,00	V	V	V	V	b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 3	Pengujian	10,00	V	V	V	V	b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Sub Variabel 4	Penyidikan	5,00	V	V	V	V	b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Variabel III	PELAPORAN	20,00	V	V	V	V	b	b x bobot	(Nilai/Bobot)*100
Jumlah		100,00						ΣNilai	Σ%Nilai

Untuk mengetahui jumlah nilai yang diperoleh tiap unit pengawasan ketenagakerjaan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kategori efektivitasnya, menggunakan rumus:

$$\mathbf{N = \frac{(A+B)}{2}}$$

Dimana:

N = Nilai Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

A = Jumlah Nilai Kriteria Umum

B = Jumlah Nilai Kriteria Khusus

Proses penghitungan Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

1. Menghitung nilai aktual dan indeks tiap-tiap sub indikator.
2. Menghitung nilai aktual dan indeks tiap-tiap indikator.
3. Menghitung nilai indeks tiap-tiap sub-variabel.
4. Menghitung nilai indeks tiap-tiap variabel.
5. Menghitung nilai indeks tiap-tiap kriteria.
6. Menghitung nilai Indeks per provinsi.
7. Menghitung nilai Indeks secara nasional.

Kategori Efektivitas

Untuk memperoleh gambaran tingkat efektivitas yang cukup baik, maka kategori efektivitas tatacara pengawasan ketenagakerjaan akan dibagi menjadi empat, yakni:

Kategori Efektivitas	Range Nilai
Sangat Efektif (Biru)	80 – 100
Efektif (Hijau)	60 – 79,99
Kurang Efektif (Kuning)	40 – 59,99
Tidak Efektif (Merah)	0 – 39,99

WEB

Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

[Bit.ly/indeks-wasnaker](https://bit.ly/indeks-wasnaker)

Jika ada kendala dalam proses Login dan penggunaan sistem, bapak/ibu dapat menghubungi:

1. Khairul Ismed no Hp 08118851568
2. Doni No HP 08176799390
3. Fennia No HP 085245427231
4. Lutfi No HP 081281749645

Masuk Aplikasi Survey

[Buku Petunjuk](#)

Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan



**INDEKS EFEKTIVITAS TATA CARA
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan

Jakarta, 2022

Sasaran Program

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja : Nilai Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan

Satuan : Nilai

Definisi Operasional : Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan Digunakan Untuk Mengevaluasi Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan

Cara Menghitung : Nilai variable dan subvariabel hasil survei dikalikan dengan bobot nilai
: Nilai Kriteria Umum dikali 50%, ditambah Nilai Kriteria khusus x 50%)

Silahkan Masuk
jika sudah memiliki
account.

1. User Name masukkan NIP
2. Password masukkan NIP
3. Tekan tombol LOG-IN

Masuk Aplikasi Survey

Silahkan Masuk
jika sudah memiliki
account.

1. User Name masukkan NIP
2. Password masukkan NIP
3. Tekan tombol LOG-IN

The screenshot shows the login page of an application titled 'Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan'. The page has a dark blue header with logos and the title. On the right side, there is a login form with fields for 'NIP' and 'Password', and a 'LOG IN' button. A red arrow points to the 'LOG IN' button. Below the header, there is a table with columns for 'Sumber Program', 'Indikator Kinerja', 'Sasaran', 'Definisi Operasional', and 'Cara Pengukuran'. The table contains several rows of data related to the effectiveness of supervision procedures.

Sumber Program	Indikator Kinerja	Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketertinggalan	Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan	Milai	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketertinggalan	Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan
Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan	Milai	Milai	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketertinggalan	Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan
Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan	Milai	Milai	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketertinggalan	Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan
Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan	Milai	Milai	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketertinggalan	Milai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketertinggalan

Perbalkan Data Responden

Perbalkan Data Responden

Nama

NIP

Nomor Telp/HP

Status Responden

Jabatan Fungsional

Foto

Simpan

DATA RESPONDEN

- Nama Responden :
- NIP :
- Nomor Telp/HP :
- Status Responden :
1. Kepala Bidang/UPTD/Korwil/....
2. Kepala Seksi/Sub Bidang
3. Pengawas Ketenagakerjaan Umum
4. Pengawas Spesialis
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
6. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Penyelenggara Administrasi Teknis Pengawasan
- Jabatan Fungsional :
1. Fungsional Ahli Pertama
2. Fungsional Ahli Muda
3. Fungsional Ahli Madya
4. Fungsional Ahli Utama
- Jika Pengawas Spesialis, sebutkan :

Mengikuti Survei

The screenshot displays the 'Mengikuti Survei' (Follow Survey) page on the 'Sistem Pengukuran Ketertarikan' (Interest Measurement System) website. The page features a dark blue header with the system logo and navigation links for 'Home' and 'Buku Petunjuk'. The main content area is divided into two sections: 'Survei' (Survey) and 'Survei Program' (Program Survey). The 'Survei' section is currently active, showing a survey titled 'Survei Hasil Ujian Indeks TFC Wawancara Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan' (Survey of Interview Results of TFC Index of Effectiveness of Interest Supervision Procedures). A red box highlights the 'Pengukuran' (Measurement) tab, and a red arrow points from it to the 'Mengikuti Survei' (Follow Survey) button. The 'Survei Program' section lists various survey topics and their corresponding indicators.

Survei Program	Indikator Kinerja	Indikator	Indikator Operasional	Cara Menghitung
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketertarikan	Nilai Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan	Nilai	Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan Digunakan	Nilai variabel dan subvariabel hasil survei dikalikan dengan bobot nilai
Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan	Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan	Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan	Indeks Efektivitas Tatacara Pengawasan Ketertarikan	Nilai kriteria (jumlah dibagi 100), dikalikan Nilai Kriteria Nomor 1 (100%)

Mengisi Survei

[Home](#)[Buku Petunjuk](#)

Survey

NO	URAIAN	REPERANGKAT
	A.	KRITERIA UMUM
	Variabel 1	KOMITMEN
	Sub-variabel 1	Rencana Program dan Kegiatan
1	Indikator 1.B.	Apakah Rencana Program dan Kegiatan Pengawasan Keternagakerjaan tertuang dalam dokumen, sebagai berikut:
	☐ a. Dokumen Rencana dan RPMD	
	☐ b. Dokumen Rencana	
	☐ c. Dokumen RPMD	
	☐ d. Tidak ada	
	Sub-variabel 1	Ketersediaan Anggaran

Men-Submit Survei



[Home](#)[Tulis Petunjuk](#)



Survei

Indikator 4.2. 2) Laporan Individu kegiatan Pembinaan, Pemeliharaan, Pengujian dan Penyidikan disampaikan kepada:

☐ a. Kepala Kepala IPTS/Korwil, dan Kepala Dinas Kertanagaberkarya Provinsi

☐ b. Kepala Kepala Dinas Kertanagaberkarya Provinsi

☐ c. Kepala Kepala IPTS/Korwil

☐ d. Tidak ada laporan

Cerima Kasih

